

RI Jawab Tegas Ancaman UE

Tanggal : Sabtu , 16 Januari 2021  
 Media : Bisnis Indonesia  
 Halaman : 5  
 Wartawan : Denis Riantza Meilanova, Rahmad Fauzan  
 Muatan Berita : Netral  
 Narasumber : Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan), Handito Joewono (Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia), Ridwan Djamaluddin (Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM)  
 Rubrik : Industri  
 Topik : Nikel

LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL

RI JAWAB TEGAS ANCAMAN UE

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan mundur selangkah pun atas ancaman Uni Eropa yang akan meningkatkan eskalasi perselisihan sengketa kasus penghentian perdagangan bijih nikel kepada World Trade Organization.

Rahmad Fauzan & Denis Riantza Meilanova  
redaksi@bisnis.com

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Indonesia tengah mendalami tuntutan dari Uni Eropa (UE) serta mengikuti aturan penyelesaian proses sengketa di WTO sesuai dengan aturan yang disepakati. "Sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia dengan senang hati akan melayani tuntutan tersebut," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (15/1). Berdasarkan kesimpulan Kementerian Perdagangan, tuntutan yang dilayangkan Uni Eropa (UE) didasarkan kepada anggapan bahwa aturan yang dimiliki Indonesia mengenai mineral menyulitkan pihak negara benua biru itu untuk bisa berkompetisi dalam industri. Lutfi juga menyatakan pemerintah berkomitmen untuk melakukan kerja sama guna menciptakan nilai tambah dari perdagangan antara Indonesia dan UE. Namun, Mendag tetap menyangkal tuntutan yang dilayangkan UE.

Secara prinsip, pemerintah berkeyakinan aturan yang dimiliki Indonesia berfungsi tidak hanya untuk menjaga sumber daya alam (SDA), tetapi juga memastikan komoditas itu bermanfaat bagi Indonesia. Pelarangan ekspor bahan mentah mineral ini dilakukan demi kepentingan domestik menggerakkan sektor penghiliran manu-

faktur nikel guna mengejar peningkatan nilai tambah. Pemerintah Indonesia membutuhkan peningkatan nilai tambah bijih nikel secara langsung karena dapat mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan nasional. "Masalah utamanya dinilai ilegal, ini baru sangkaan mereka. Ini akan dibuktikan dulu di panel, dan kita akan membela kepentingan kita. Saya yakin, untuk menjamin sustainability SDA, kita ada di jalan yang benar." Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono menilai peluang ekspor produk olahan nikel dalam negeri pada masa mendatang masih cukup baik meskipun UE melayangkan tuntutan ke WTO terkait dengan sengketa nikel.

Handito menilai pemanfaatan produk olahan nikel yang diyakini meningkat dalam beberapa tahun ke depan diiringi dengan percepatan proses industrialisasi nikel yang juga terus berlangsung di Indonesia saat ini. "Peluangnya ekspor produk olahan nikel Indonesia masih akan cukup baik dan cukup panjang perjalanan ke sana. Pasalnya, pemanfaatan nikel meningkat, kemudian karena dorongan pemerintah industrialisasinya berjalan cepat," ujar Handito.

Dia juga menilai tuntutan yang dilayangkan UE ke WTO terkait dengan sengketa nikel tidak akan berdampak kepada kinerja ekspor produk olahan nikel RI.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soerisno mengusulkan pemerintah mengundangi perusahaan di UE yang memerlukan bahan baku nikel untuk berinvestasi di Indonesia.

Menurutnya, potensi perusahaan di UE berinvestasi ke dalam

negeri cukup besar mengingat sumber pembiayaan di Eropa yang sangat banyak, sehingga cukup memungkinkan untuk melakukan investasi.

"Undang saja pelaku industri Uni Eropa yang perlu nikel untuk investasi ke dalam negeri. Sumber pembiayaan dari lembaga keuangan di Eropa sangat banyak yang bisa mendorong perusahaan di sana untuk investasi di Indonesia," ujar Benny.

Hal tersebut, lanjutnya, cukup mungkin terjadi seiring dengan keseriusan pemerintah dalam menyalakan tuntutan yang dilayangkan Uni Eropa ke WTO terkait dengan sengketa nikel dengan Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal menilai posisi Indonesia cukup kuat dalam menghadapi sengketa di WTO. Menurutnya, tuntutan UE dinilai tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada aturan WTO yang melarang suatu negara untuk tidak melakukan ekspor.

"Tidak ada aturan WTO yang melanggar karena tidak ada aturan WTO yang melarang suatu negara untuk tidak melakukan ekspor," ujar Faisal.

ARGUMEN KUAT

Dia berharap pemerintah tidak kecolongan dalam pembahasan panel pada 25 Januari 2021, dengan mengumpulkan bukti-bukti kuat bahwa negara tidak melanggar aturan WTO.

Dia juga berharap pemerintah dapat mengumpulkan argumen kuat yang menunjukkan industri nikel merupakan bagian dari kepentingan nasional.

Menurutnya, perihal argumen terkait dengan kepentingan nasional merupakan hal yang sangat fundamental bagi suatu negara dalam pembahasan sengketa internasional.

Dalam kesempatan lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey menyatakan tidak keberatan dengan aturan larangan

Sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia dengan senang hati akan melayani tuntutan tersebut.

dari kami ini kapan. Sampai saat ini, proyeksi kami sampai 2 tahun ke depan, masih bermain di saprolit, nikel kadar tinggi," katanya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefullah mengatakan bahwa dari 73 perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 65 perusahaan atau 89% sudah memenuhi ketentuan HPM nikel. Masih terdapat delapan perusahaan atau 11% yang belum memenuhi ketentuan HPM.

Yunus juga menargetkan ada empat smelter beroperasi tahun ini terdiri atas tiga smelter nikel dan satu smelter timbal.

Tiga smelter nikel ini dibangun oleh PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. di Tanjung Buli, Maluku Utara, PT CMMI di Cikande, dan PT SNI di Cilegon.

"Satu lagi smelter timbal. Perusahaannya PT Kapuas Prima Coal," kata Yunus.

Sampai dengan 2020, realisasi jumlah smelter yang beroperasi mencapai 19 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 13 smelter nikel, dua smelter bauksit, satu smelter besi, dua smelter tembaga, dan 1 smelter mangan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin memaparkan bahwa sampai dengan 2020, teralisasi 19 smelter yang sudah beroperasi. Pembangunan smelter ini ditargetkan terus meningkat hingga mencapai total 53 smelter pada 2024.

"Pada 2021 akan bertambah menjadi 23 smelter dan terus naik 28 smelter di 2022, dan puncaknya 53 smelter di 2024. Nilai investasi di 2021 akan tercapai US\$2,2 miliar," ujar Ridwan.

Menurutnya, pengerjaan pembangunan smelter memang sedikit bergeser dari rencana semula akibat kondisi pandemi Covid-19.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa target penyelesaian pembangunan tidak mengalami perubahan. Semua proyek smelter yang telah direncanakan harus terbangun dan beroperasi pada 2023 akhir. ■



POTENSI BERKEMBANG

Kebijakan pemerintah menyempit ekspor bijih nikel memberikan peluang besar pengembangan industri turunannya. Sejalan ini, pemerintah telah merancang pengembangan smelter guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Komoditas	Existing	Rencana	Total	Total Investasi (US\$ juta)	Realisasi per Semester I/2020 (US\$ juta)
Nikel	13	17	30	8.006,5	6.261,2
Bauksit	2	9	11	8.647,2	4.293,7
Besi	1	3	4	193,9	140,5
Tembaga	2	2	4	4.693,2	1.332,8
Mangan	1	1	2	23,9	13,3
Timbal & Seng	0	2	2	28,8	19,7

